

Nomor : 0100/HMS/SP/03/2026

Tanggal : 25 Maret 2026

## NGABUBURIT PENGAWASAN BAWASLU SULUT: PERKUAT KAPASITAS PENGAWAS PEMILU, MENJAGA KUALITAS DEMOKRASI

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan dan refleksi pengawasan Pemilu di masa non tahapan Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara menggelar kegiatan “**Ngabuburit Pengawasan**” yang berlangsung sejak 23 Februari hingga 11 Maret 2026.

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog dan refleksi bagi jajaran pengawas pemilu dalam memperkuat komitmen menjaga kualitas demokrasi. Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa Ngabuburit Pengawasan merupakan momentum reflektif bagi pengawas pemilu untuk mengisi kembali energi serta memperkuat daya juang dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Ngabuburit Pengawasan bukan sekadar forum diskusi, tetapi momentum yang tepat untuk mengisi ulang energi dan daya juang kita. Pada masa tahapan pemilu, kita mengerahkan seluruh energi untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik,” tegasnya.

Berdasarkan data rekap pelaksanaan Ngabuburit Pengawasan Tahun 2026, kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum ini terlaksana secara masif di berbagai tingkatan kelembagaan pengawas pemilu di Indonesia. Secara nasional tercatat 2.134 kegiatan Ngabuburit Pengawasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berbagai mekanisme pelaksanaan.

**Mari Jo Torang Awasi Sama-Sama**





Dari keseluruhan kegiatan tersebut, pelaksanaan terbagi dalam tiga mekanisme, yaitu daring sebanyak 921 kegiatan (43%), luring sebanyak 772 kegiatan (36%), serta hybrid sebanyak 441 kegiatan (21%). Variasi mekanisme ini menunjukkan upaya Bawaslu dalam menyesuaikan pola pelaksanaan kegiatan dengan kondisi wilayah serta memaksimalkan partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital dan pertemuan tatap muka.

Pada tingkat provinsi, kegiatan Ngabuburit Pengawasan dilaksanakan oleh 38 provinsi dengan total 173 kegiatan. Dari jumlah tersebut, 90 kegiatan (52%) dilaksanakan secara daring, 31 kegiatan (18%) secara luring, dan 52 kegiatan (30%) melalui mekanisme hybrid. Beberapa provinsi tercatat memiliki jumlah kegiatan yang cukup tinggi, antara lain Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Lampung. Sementara itu, Sulawesi Utara tercatat melaksanakan 6 kegiatan yang seluruhnya menggunakan mekanisme hybrid.

Di tingkat kabupaten/kota, kegiatan Ngabuburit Pengawasan menunjukkan partisipasi yang sangat luas. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 496 daerah telah melaksanakan kegiatan, dengan total 1.946 kegiatan yang tercatat. Mekanisme pelaksanaan didominasi oleh daring sebanyak 819 kegiatan (42%), disusul luring sebanyak 741 kegiatan (38%), dan hybrid sebanyak 386 kegiatan (20%). Rata-rata pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota mencapai sekitar 4,65 kegiatan per daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan tingginya partisipasi jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia dalam memanfaatkan momentum Ngabuburit Pengawasan sebagai ruang dialog, refleksi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu tidak hanya memperkuat koordinasi internal, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat, akademisi, serta pegiat demokrasi dalam upaya menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.



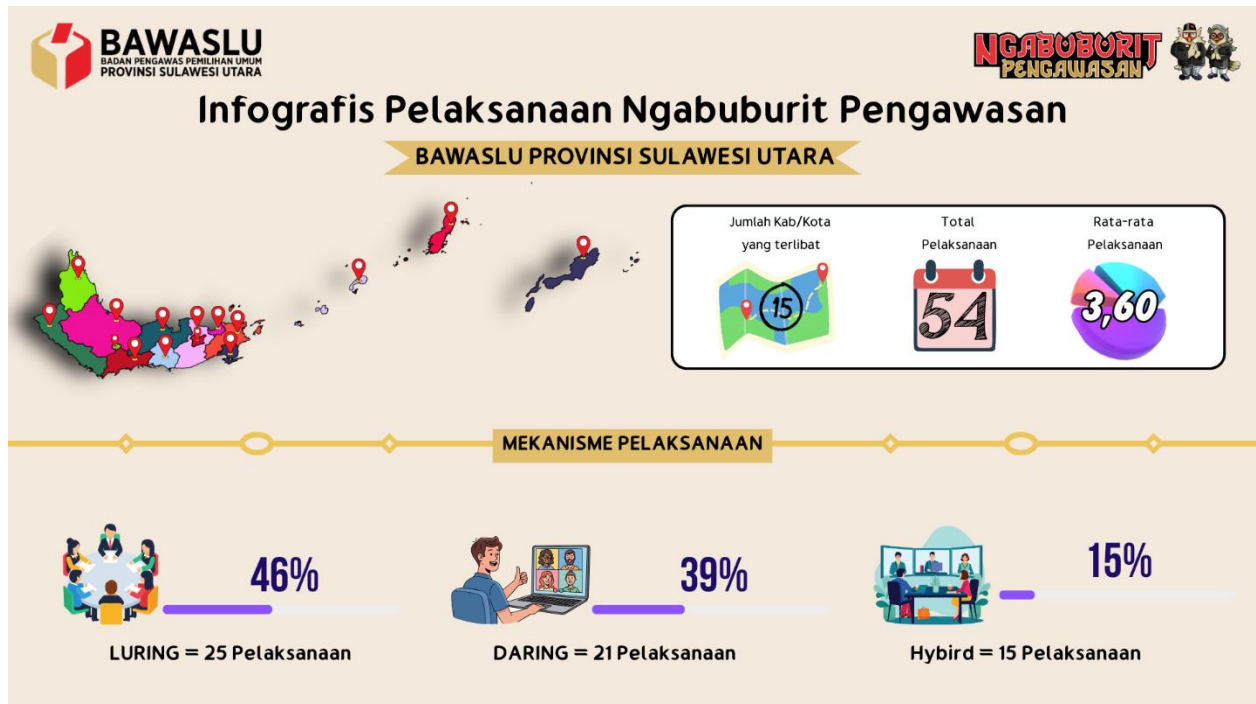
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh, menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga sarana mempererat solidaritas serta memperkuat kebersamaan di antara jajaran pengawas pemilu.

Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, Bawaslu berupaya membangun penguatan kapasitas kelembagaan sekaligus menjaga semangat kolektif dalam menjalankan tugas pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, mulai dari praktisi penyelenggara pemilu, akademisi, hingga pegiat kepemiluan. Para narasumber berdialog dan berbagi pandangan terkait berbagai isu strategis, antara lain penguatan tata kelola kelembagaan Bawaslu, rancang bangun kapasitas sumber daya manusia dan organisasi pengawas pemilu yang efektif, serta strategi pengawasan pemilu melalui pendekatan pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya membangun sistem hukum pemilu yang berkeadilan, menjaga integritas dan etika penyelenggara pemilu dalam proses penanganan pelanggaran, serta memperkuat peran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Khusus untuk Sulawesi Utara, Kegiatan Ngabuburit Pengawasan diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara serta para Alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) se-Sulawesi Utara. Berikut infografis dan tabel pelaksanaan kegiatan Ngabuburit Pengawasan Se-Sulawesi Utara :



Melalui kegiatan ini, Bawaslu juga menekankan pentingnya menjaga integritas demokrasi di tengah masyarakat, termasuk meningkatkan literasi publik dalam menghadapi penyebaran hoaks serta mencegah terjadinya polarisasi sosial yang dapat mengganggu kualitas proses demokrasi.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum terus berkomitmen memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui berbagai forum penguatan kapasitas seperti Ngabuburit Pengawasan, Bawaslu berharap dapat membangun ekosistem pengawasan yang kolaboratif, partisipatif, dan berintegritas guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara.

